



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 51);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 51) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 76

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 51
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

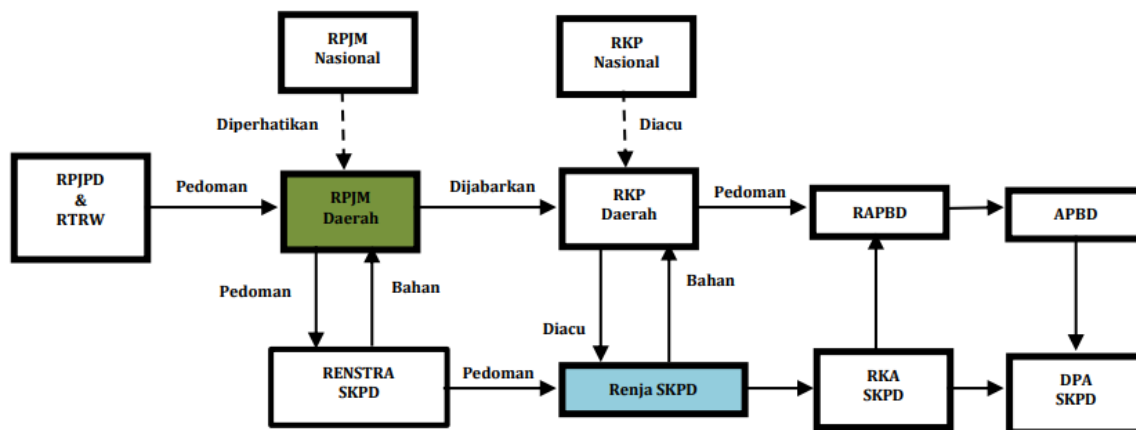
Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut tahun 2023, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut dan mengacu pada RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;
- c. Penyusunan Renja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan

penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja memuat penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra dan RKPD. Renja merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Keterkaitan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut dengan Dokumen Perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Nasional hingga Daerah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Perbandingan sasaran dan indikator kinerja daerah dengan realisasi kinerja nasional dilakukan dengan membandingkan sasaran dan indikator Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut dengan sasaran strategis dan indikator kinerja Kementerian/Lembaga sejenis lainnya. Perbandingan kinerja tersebut dengan melihat adanya kesamaan tugas dan fungsi sehingga dapat dijadikan benchmark. Dalam laporan kinerja ini, benchmarking dilakukan terhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Salah satu sasaran strategis Kementerian PUPR yaitu Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau sangat berkaitan dengan salah satu sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut mengenai Peningkatan

Hunian dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang memadai dengan beberapa indikator yang juga terkait dengan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR yaitu capaian Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Luas Kawasan Permukiman yang dilengkapi dengan PSU yang representatif.

Tabel *Benchmarking* Sasaran Strategis Kabupaten Garut dengan Sasaran Strategis Nasional di Lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut		Sasaran Strategis Kementerian PUPR	
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
1.	Meningkatnya hunian dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai	Prosentase penanganan rumah korban bencana dan terdampak program pemerintah	(SS-3) Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Tidak ada indikator yang sama
		Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah		Tidak ada indikator yang sama
		Cakupan Penurunan Luasan Permukiman Kumuh		Tidak ada indikator yang sama
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
		Luas Kawasan Permukiman yang Dilengkapi dengan PSU yang Representatif		Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>Smart Living</i>
2.	Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Bidang	Prosentase penyelesaian kasus tanah negara	Tidak ada sasaran yang berkaitan	Tidak ada indikator yang sama

Pertanahan			
------------	--	--	--

Dalam konteks regional provinsi, Program Prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan Program Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

Tabel *Benchmarking* Sasaran Strategis Kabupaten Garut dengan Sasaran Strategis Provinsi Jawa Barat di Lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

Selarasnya Program dan Kegiatan terkait Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Garut dengan program prioritas nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat juga diimplementasikan melalui program bantuan pemerintah pusat terhadap penyediaan perumahan (Program BSPS) serta bantuan provinsi untuk pengentasan Rutilahu, serta bantuan terhadap penyediaan PSU Permukiman.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah di tetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan

kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

- Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah No. 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 40/Se/Dc/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh;
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun 2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031

- (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 5 Tahun 2017 Tentang, Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 37. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
38. Peraturan Bupati Garut Nomor 153 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019-2024;
 39. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 251 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Garut;
 40. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
 41. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Tahun 2023;
 42. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
 43. Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 663/KEP.1131-BAPPEDA/2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Garut;
 44. Dokumen RPLP (Rencana Pembangunan Lingkungan Permukiman).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Dan Permukiman sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Dan Permukiman sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Sampai Triwulan II Tahun 2023**

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2023	Realisasi Renstra Tahun 2023		Pagu APBD Parsial III Tahun 2023	Realisasi APBD Triwulan II Tahun 2023	
						Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.
1	2				1	2	3		4	5	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.173.025.000	59	7.222.739.640	11.188.274.044	65	7.222.739.640
1	4	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	54	53.640.000	55.040.000	97	53.640.000
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.436.750.000	53	3.960.210.966	7.509.022.135	53	3.960.210.966
1	4	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.000.000	23	46.493.900	149.448.000	31	46.493.900
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	50	75.109.600	75.442.600	100	75.109.600
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	600.000.000	55	332.246.500	439.317.439	76	332.246.500

1	4	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.850.000.000	92	1.696.531.000	1.751.179.100	97	1.696.531.000
1	4	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.275.000	48	161.925.074	311.326.170	52	161.925.074
1	4	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.500.000.000	60	896.582.600	897.498.600	100	896.582.600
1	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3050000000	-		2.492.050.000	97	2.419.061.400
1	4	2	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0	0		0
1	4	2	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.000.000.000	81	2.419.051.400	2.492.050.000	97	2.419.061.400
1	4	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.350.000.000	1	481.231.400	1.479.710.400	33	481.231.400
1	4	3	2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	50.000.000	159	79.710.400	79.710.400	100	79.710.400
1	4	3	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	7.300.000.000	6	401.521.000	1.400.000.000	29	401.521.000
1	4	4		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	45.000.000.000	41	18.310.000.000	12.168.240.000	94	11.471.298.200

1	4	4	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000.000	41	18.310.000.000	12.168.240.000	94	11.471.298.200
1	4	5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	389.300.000.000	49	29.497.358.070	69.051.733.360	43	29.497.358.070
1	4	5	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	389.300.000.000	8	29.497.358.070	69.051.733.360	43	29.497.358.070
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	1	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
2	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	200.000.000	13	26.002.800	50.757.120	51	26.002.800
2	1	2	2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	13	26.002.800	50.757.120	51	26.002.800
2	1	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	200.000.000	100	200.942.700	235.563.500	85	200.942.700
2	1	4	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	100	200.942.700	235.563.500	85	200.942.700
2	1	5		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		0	0	0		0
2	1	5	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	0	0	0		0

2	1 0	6		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	300.000.000	72	215.042.000	299.226.000	72	215.042.000
2	1 0	6	2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	108	215.042.000	299.226.000	72	215.042.000
2	1 0	6	2.0 2	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	0	0	0		0
2	1 0	7		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	100.000.000	0	0	0		0
2	1 0	7	2.0 1	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	0	0	0		0

Sumber : Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023. Total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. 457.673.025.000,00 sedangkan total pagu yang ditetapkan pada Parsial III TA. 2023 adalah Rp. 96.965.554.424,00 melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 51.533.676.210,00.

Target capaian dan pagu Renja apabila dibandingkan dengan target capaian dan pagu indikatif Renstra tahun 2023, terdapat pagu renja yang melebihi pagu dalam renstra pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee. Hal itu disebabkan karena adanya penambahan target capaian dari 5 (lima) kasus menjadi 30 (tiga puluh) kasus penyelesaian sengketa lahan permukiman masyarakat yang menempati kawasan hutan. Dengan penambahan target tersebut maka pagu program juga bertambah, penambahan tersebut untuk mengakomodir program PPTPKH yang diinisiasi oleh Kementerian LHK sebagai tindaklanjut penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Garut.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 84% untuk target kinerja dan 33% untuk target anggaran.

Tabel 2. 2 Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50	57
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95	53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	31
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	46
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	75
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	147	77
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	95
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70	50
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	33
Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	58
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200	100

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58	26
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	57
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35	62
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	100
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100	100
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100	100
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	55	7
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	35	41
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	100	49

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	-	76
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	100	13
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	100
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	100	100

Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Tidak dianggarkan pada TA. 2023	

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran RENJA Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun 2023 Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) (Rp)	Realisasi terhadap Renja (%)	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) (Rp)
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.775.079.674	55,47	55.895.366.950
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.248.921.214	120,45	13.548.896.680
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.040.000	13122,71	7.222.739.640
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.894.702.140	0,78	53.640.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	149.448.000	2649,89	3.960.210.966
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.442.600	61,63	46.493.900
Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.562.039	13,28	75.109.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.751.106.800	18,97	332.246.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.729.035	648,20	1.696.531.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.495.890.600	10,82	161.925.074
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.742.250.000	32,70	896.582.600
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0		0
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.742.250.000	88,21	2.419.061.400
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.479.710.400	32,52	481.231.400
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	79.710.400	100,00	79.710.400
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.400.000.000	28,68	401.521.000
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	13.218.240.000	86,78	11.471.298.200
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah	13.218.240.000	86,78	11.471.298.200

Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	72.085.958.060	40,92	29.497.358.070
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	72.085.958.060	40,92	29.497.358.070
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	324.120.620	136,37	441.987.500
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	56.157.120	46,30	26.002.800
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	56.157.120	46,30	26.002.800
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	267.963.500	74,99	200.942.700
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	267.963.500	74,99	200.942.700
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0		0
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0		0
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	299.226.000	71,87	215.042.000
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	299.226.000	71,87	215.042.000
Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0		0

PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	0		0
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0		0

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 di Bidang Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman) adalah 78,05% dan di Bidang Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan) adalah 64,95%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 64% untuk target kinerja, dan 71,5% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2. 4 Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun 2023 Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65	59,33
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95	62,06
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53	46,20
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	61	38,06
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31	31,11
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	99,56
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	88	87,89
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	99,52
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59	59,34
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	99,50

Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	55,13
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73	49,12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	99,88
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83	82,67
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98	97,73
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29	25,49
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61	41,41
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	99,89
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	97	37,56
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	97	37,56
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	33	20,02
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100	100
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	0	0,00
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	38	20,62

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	94	81,66
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	94	81,66
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	43	32,72
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	43	32,60
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	84	80,98
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	51	32,51
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	51	32,51
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	85	85,30
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	85	85,30
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	72	53,93
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	72	53,93

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Garut

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat at daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat at Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	4										
1	4	1									
1	4	1	2.01								

1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi								
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ruang yang terfasilitasi komponen instalasi listrik	60 ruangan	22 ruangan	22 Ruang an	22 Ruang an	100 %	22 Ruan gan	66 ruangan	110,00
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 jenis	5 jenis	5 Jenis	5 Jenis	100 %	5 jenis	15 jenis	75,00
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	40 jenis	7 jenis	7 Jenis	7 Jenis	100 %	7 paket	21 jenis	52,50
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 eksemplar	1 eksemplar	111 Ekse mplar	111 Ekse mplar	100 %	111 dokume n	223 eksemplar	5575,00
1	4	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 paket	1 paket	2500 Oran g	2500 Oran g	100 %	12 paket/ laporan	13 paket	300,00
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi	48 OH	12 OH	280 OH	280 OH	100 %	70 laporan	292 OH	608,33

1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	75,00
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 unit	1 unit	14 Unit	14 Unit	100 %	10 unit	25 unit	625,00
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4orang	1 orang	5 Orang	5 Orang	100 %	1 laporan	6 orang	150,00
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi								
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan			6 unit	6 unit	100 %	tidak ada di 2023	6 unit	100,00

1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 unit	2 unit	2 Unit	2 Unit	100 %	7 unit/tahun	11 unit	13,75
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung / Kantor yang terpelihara	1600 M2	841 M2	1700 M2	840 M2	49%	7500 M2	9181 M2	573,81
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah								
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah								
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	600 unit	150 unit	100 Unit	486 unit	486 %	150 unit	786 unit	131,00

1	4	2	2.03	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi			63 unit	63 unit	100 %	73 unit	136 unit	100,00
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Perizinan dan Pengembangan Perumahan yang memenuhi persyaratan								
1	4	3	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Perizinan dan Pengembangan Perumahan yang memenuhi persyaratan								
1	4	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	4 laporan	tidak dilaksanakan pada 2022	tidak dilaksanakan pada 2022	tidak dilaksanakan pada 2022	-	1 laporan	1 laporan	25,00

1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luasan dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertangani								
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	4 dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	50,00
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	24 Ha	1,3 ha	1 Ha	1,3 Ha	130 %	6 ha	3,2 ha	13,33
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki								
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki								

1	4	4	2.01	1	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	12000 unit	1980 unit	1116 Unit	1116 Unit	100 %	195 unit	3291 unit	27,43
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif								
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Luasa Kawasan Permukiman Kumuh dengan PSU yang representatif								
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang	400 ha	400 ha	155 ha	98,172 ha	63%	111 ha/100 lokasi	609,172 ha	152,29

2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah dokumen hasil Monitoring terkait izin lokasi untuk investasi dan kegiatan usaha oleh masyarakat swasta	4 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	75
2	#	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang ditangani								
2	#	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang ditangani								
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	4 kasus	8 kasus	5 Kasus	8 kasus	160 %	30 Berita Acara	46 kasus/ berita acara	1150
2	#	6			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah yang Ditetapkan								
2	#	6	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah yang Ditetapkan								

2	1	6	2.01	1	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	tidak dilaksanakan pada 2022	tidak dilaksanakan pada 2022	tidak dilaksanakan pada 2022	-	1 dokumen	1 dokumen	25
2	#	#			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH									
2	#	#	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota									
2	1	1	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	jumlah aplikasi perencanaan penggunaan tanah yang di bangun			1 aplikasi	1 aplikasi	100 %	tidak dilaksanakan pada 2022	tidak dilaksanakan pada 2022	-

Sumber : Hasil Olahan Berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2024 dan Renja 2022

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 65.818.980.013,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 51.533.676.210,00 atau mencapai 78,30%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 5 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	1	2	4	3
		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	65.818.980.013	51.533.676.210	0,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	65.469.580.013	51.091.688.710	78,04
1	4	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.395.223.013	7.222.739.640	63,38
1	4	1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.040.000	53.640.000	97,46
1	4	1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.995.000	24.995.000	100,00
1	4	1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.045.000	28.645.000	95,34
1	4	1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.660.871.104	3.960.210.966	51,69
1	4	1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.635.871.104	3.944.930.966	51,66
1	4	1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	15.280.000	61,12
1	4	1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	149.448.000	46.493.900	31,11
1	4	1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	149.448.000	46.493.900	31,11
1	4	1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.442.600	75.109.600	99,56

1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.442.600	75.109.600	99,56
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	439.317.439	332.246.500	75,63
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.169.600	23.000.000	87,89
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.339.239	94.878.000	99,52
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.408.600	50.088.500	59,34
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.950.000	99,50
1	4	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.600.000	29.000.000	55,13
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.800.000	125.330.000	73,38
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.806.279.100	1.696.531.000	93,92
1	4	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.386.648.600	1.329.900.000	95,91
1	4	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288.650.000	238.625.000	82,67
1	4	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.980.500	128.006.000	97,73
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.326.170	161.925.074	52,01
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.599.420	30.936.074	29,02
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000	17.500.000	100,00
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.226.750	113.489.000	60,62
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	897.498.600	896.582.600	99,90
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.740.000	92.740.000	100,00
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	804.758.600	803.842.600	99,89
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	950.000.000	2.419.061.400	254,64
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	950.000.000	2.419.061.400	254,64

					Kabupaten/Kota			
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	950.000.000	2.419.061.400	254,64
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.500.000.000	481.231.400	32,08
1	4	3	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100.000.000	79.710.400	79,71
1	4	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100.000.000	79.710.400	79,71
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.400.000.000	401.521.000	28,68
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	349.999.900		0,00
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1.050.000.100	401.521.000	38,24
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.505.000.000	11.471.298.200	327,28
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.505.000.000	11.471.298.200	327,28
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.505.000.000	11.471.298.200	327,28
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	48.119.357.000	29.497.358.070	61,30
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	48.119.357.000	29.497.358.070	61,30
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	47.909.557.000	29.346.061.470	61,25
1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	209.800.000	151.296.600	72,11

2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	349.400.000	441.987.500	126,50
2	10	2		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	64.200.000	26.002.800	40,50
2	10	2	2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	64.200.000	26.002.800	40,50
2	10	2	2.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	64.200.000	26.002.800	40,50
2	10	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	285.200.000	200.942.700	70,46
2	10	4	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	285.200.000	200.942.700	70,46
2	10	4	2.01	2 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	285.200.000	200.942.700	70,46
2	10	6		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	100.000.000	215.042.000	215,04
2	10	6	2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	215.042.000	215,04
2	10	6	2.01	1 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	100.000.000	215.042.000	215,04

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Triwulan II TA. 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 14 subkegiatan yang belum mencapai target, penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Program Kawasan Permukiman Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui program unggulan Disperkim Garut yaitu Nata Kota yang dilaksanakan melalui swakelola tipe 1, dimana pekerjaannya baru dimulai pada 13 Mei 2023 sehingga progres sampai akhir triwulan II masih dibawah target, pekerjaan akan berlanjut hingga Bulan Oktober atau triwulan III;
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan sampai pada

triwulan II realisasi secara keuangan masih kecil karena masih dalam tahap proses pengerjaan konstruksi

3. Program Pengelolaan Izin Lokasi dan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan merupakan program yang dilaksanakan untuk menangani konflik pemanfaatan kawasan hutan untuk kawasan permukiman masyarakat melalui program PPTPKH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hingga saat ini, penanganannya sudah mencapai target kinerja, namun progresnya hingga saat ini menunggu hasil dari Kementerian LHK.

Selain itu, terdapat 16 subkegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena faktor-faktor berikut:

1. Penetapan target capaian dengan melihat realisasi program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya dan memperhitungkan kemampuan anggaran saat ini serta tren anggaran tahun-tahun sebelumnya;
2. Adanya Tenaga Ahli yang unggul di bidangnya dalam pelaksanaan program kegiatan;
3. Stakeholder yang mendukung dalam pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya pada kegiatan penyediaan hunian bagi korban bencana dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni.

- **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Implikasi merupakan suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Pada persandingan Target capaian dan pagu Renja dengan target capaian dan pagu indikatif Renstra tahun 2023, terdapat pagu renja yang melebihi pagu dalam renstra pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee. Hal itu disebabkan karena adanya penambahan target capaian dari 5 (lima) kasus menjadi 30 (tiga puluh) kasus penyelesaian sengketa lahan permukiman masyarakat yang menempati kawasan hutan. Dengan penambahan target tersebut maka pagu program juga bertambah, penambahan tersebut untuk mengakomodir program PPTPKH yang diinisiasi oleh Kementerian LHK sebagai tindak lanjut penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Garut.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Garut adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Dinas Perumahan dan Permukiman Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.
- c. Terhadap program yang bertambah target dan pagu anggarannya dibanding Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, faktor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

1. Fokus perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 masih berfokus kepada penyediaan infrastruktur berupa penyediaan prasarana, sarana, utilitas berkondisi baik pada perumahan dan kawasan permukiman, pengurangan kawasan kumuh melalui penataan dan pemugaran kawasan permukiman kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni, rehabilitasi terhadap rumah korban terkena bencana, dan penanganan konflik pertanahan.
2. Perlu adanya sumber anggaran lainnya untuk meningkatkan capaian indikator program dan kegiatan melalui pengajuan bantuan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta dari stakeholder lainnya;
3. Selain pada belanja infrastruktur, maka fokus penganggaran tetap memperhatikan biaya atau belanja yang bersifat wajib mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan, belanja pembayaran rekening air,

listrik dan jaringan telekomunikasi, pembayaran retribusi, dan pembayaran retribusi lainnya yang bersifat rutin dan wajib dilaksanakan.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 6 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1.	Meningkatnya Hunian dengan Prasarana Sarana dan Utilitas yang Memadai	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi																		Sekretariat	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi																		Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan (dokumen)	9	200.000.000	2	25.000.000	2	24.995.000	1	18.345.000	2	24.995.000	2	24.995.000	2	24.995.000	4	49.995.000	44	25,00	Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	16	200.000.000	4	30.000.000	4	30.045.000	0	-	2	18.645.000	4	30.045.000	4	30.045.000	8	60.045.000	50	30,02	Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	254	28.877.837.000	62	6.074.864.046	64	7.484.022.135	64	1.263.595.936	64	3.457.626.475	64	4.237.863.778	64	4.237.863.778	126	10.912.727.824	50	37,79	Sub Bagian Keuangan dan BMD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	4	200.000.000	1	24.999.900	1	25.000.000	0,4	9.514.000	1	9.514.000	1	15.280.000	1	15.280.000	2	40.279.900	50	20,14	Sub Bagian Keuangan dan BMD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi																			
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (orang)	4	400.000.000	1	148.489.000	1	149.448.000	0,-		1	46.493.900	1	46.493.900	1	46.493.900	2	194.982.900	50	48,75	Sub Bagian Keuangan dan BMD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi																			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	2	40.000.000	-	0	-	0													Sub Bagian Umum, Peencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (buah)	4	400.000.000	-	0	1	75.442.600	1	73.080.000	1	75.109.600	1	75.109.600	1	75.109.600	1	75.109.600	25	18,78	Sub Bagian Umum, Peencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	200.000.000	32	31.400.000															Sub Bagian Umum, Peencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi																			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ruang yang terfasilitasi komponen instalasi listrik (ruangan)	60	120.000.000	22	26.172.000	15	26.169.600	15	3.000.000	15	23.000.000	15	26.169.600	15	26.169.600	37	52.341.600	62	43,62	Sub Bagian Umum, Peencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (jenis)	20	400.000.000	5	273.732.507	5	95.339.239	5	94.878.000	5	94.878.000	5	94.878.000	5	94.878.000	10	368.610.507	50	92,15	Sub Bagian Umum, Peencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia (jenis)	40	400.000.000	7	131.481.530	10	84.408.600	2	19.924.300	5	50.088.500	10	70.691.300	10	70.691.300	17	202.172.830	43	50,54	Sub Bagian Umum, Peencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (keemplar)	4	120.000.000	1	10.000.000	111	10.000.000	111	9.950.000	111	9.950.000	111	10.000.000	111	10.000.000	112	20.000.000	####	16,67	Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (paket)	4	200.000.000	1	50.000.000	1	52.600.000	3	10.000.000	8	29.000.000	8	39.000.000	8	39.000.000	9	89.000.000	225	44,50	Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (OH)	48	400.000.000	12	127.703.000	12	170.800.000	20	39.690.000	40	83.890.000	40	144.850.000	40	144.850.000	52	272.353.000	108	68,09	Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi																			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	7	1.750.000.000	-	0	2	1.331.548.600	0	-	4	1.329.900.000	2	1.329.900.000	2	1.329.900.000	2	1.329.900.000	29	75,99	Sub Bagian Keuangan dan BMD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	8	200.000.000	-	0	2	288.650.000	7	238.625.000	7	238.625.000	2	238.625.000	2	238.625.000	2	238.625.000	25	119,31	Sub Bagian Keuangan dan BMD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (jenis)	40	400.000.000	17	177.419.293	10	130.980.500	0	-	12	128.006.000	10	128.006.000	10	128.006.000	27	305.425.293	68	76,36	Sub Bagian Keuangan dan BMD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi																			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (bulan)	48	474.113.750	12	48.747.096	12	106.599.420		16.569.454	8	27.174.323	7	34.840.546	7	34.840.546	19	83.387.642	40	17,59	Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (unit)	4	60.000.000	1	61.859.300	1	17.500.000		17.500.000	10	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	2	79.359.300	50	132,27	Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (orang)	4	800.000.000	1	181.561.000	1	187.226.750			1	77.525.000	1	113.489.000	1	113.489.000	2	295.050.000	50	36,88	Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi																			

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	40	500.000.000	0	44.636.800		0												Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	80	800.000.000	2	27.279.400	20	92.740.000	7	90.000.000	7	92.740.000	20	92.740.000	20	92.740.000	22	120.019.400	28	20,00	Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung / Kantor yang terpelihara (M2)	1000	800.000.000	841	674.137.935	400	804.758.600	400	527.938.000	400	803.842.600	400	803.842.600	400	803.842.600	####	1.477.980.535	78	184,75	Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah																			Bidang Perumahan
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan Terdampak Program Pemerintah																			Bidang Perumahan
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	50.000.000				0													Bidang Perumahan
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah																			Bidang Perumahan
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Tersejahterakan (unit)	600	6.000.000.000	150	2.147.972.524	150	2.492.050.000	0		60	936.099.000	150	2.419.061.400	150	2.419.061.400	300	4.567.033.924	50	76,12	Bidang Perumahan
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	400.000.000	1	86.383.000															Bidang Perumahan

Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	3200	3.600.000.000	726	347.029.300															Bidang Perumahan
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana akat (unit)	110	4.400.000.000	73	14.486.983.600															Bidang Perumahan
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah perumahan yang dikendalikan																			Bidang Perumahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	250.000.000																	Bidang Perumahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Perizinan dan Pengembangan Perumahan yang memenuhi persyaratan																			Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Perizinan dan Pengembangan Perumahan yang memenuhi persyaratan																			Bidang Perumahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan Rumah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan Rumah (laporan)	4	200.000.000			1	79.710.400	1		1	79.710.400	1	79.710.400	1	79.710.400	1	79.710.400	25	39,86	Bidang Perumahan
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Rumah dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Rumah dengan Luasan dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertangant																			Bidang Kawasan Permukiman
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Rumah	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Rumah (dokumen)	4	700.000.000	1	52.433.000	1	349.999.900													Bidang Kawasan Permukiman
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	12000	#####	0	0															Bidang Kawasan Permukiman

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemukiman Kumuh	4	200.000.000	0	0																Bidang Kawasan Permukiman
Pelaksanaan Pembargaran Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh (Ha)	24	34.000.000.000	0	485.219.400	0	1.050.000.100	0	-	0,3	216.561.000	4	689.622.000	4	689.622.000	4	1.174.841.400	17	4,90		Bidang Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki																				Bidang Perumahan
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki																				Bidang Perumahan
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (unit)	12000	*****	1980	38.430.000.000	3000	12.168.240.000	128	8.035.000.000	160	9.936.298.200	3000	11.471.298.200	3000	11.471.298.200	*****	49.901.298.200	42	27,72		Bidang Perumahan
PROGRAM PERINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif																				Bidang Kawasan Permukiman
Urusa Penyelenggaraan PSU Perumahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan PSU yang representatif																				Bidang Kawasan Permukiman
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2	200.000.000																		Bidang Kawasan Permukiman
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Harian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Harian (ha)	400	*****	400	55.976.303.699	21	66.871.936.760	1	960.074.000	7	22.449.830.470	12	30.786.968.470	12	30.786.968.470	412	86.763.272.169	103	36,15		Bidang Kawasan Permukiman

		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (laporan)	4	800.000.000	1	74.999.900	1	179.796.600	7	109.636.600	9	139.896.600	1	151.296.600	1	151.296.600	2	226.296.500	50	28,29	Bidang Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2.	Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Bidang Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																				
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Jumlah Data Izin Tanah yang Sesuai Dengan Peruntukan Izin Lokasi yang diterbitkan																		Bidang Pertanahan	
		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Izin Tanah yang Sesuai Dengan Peruntukan Izin Lokasi yang diterbitkan																		Bidang Pertanahan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemitraan Berusaha	Jumlah dokumen hasil Monitoring terkait izin lokasi untuk investasi dan kegiatan usaha oleh masyarakat swasta (dokumen)	4	800.000.000	1	50.757.120	1	200.000.000	0		1	16.502.800	1	38.396.800	1	38.396.800	2	89.153.920	50	11,14	Bidang Pertanahan
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang dihangani																		Bidang Pertanahan	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang dihangani																		Bidang Pertanahan	
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	400.000.000	0	0	0	0												Bidang Pertanahan	
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang dihangani (kasus)	4	800.000.000	1	235.563.500	1	200.000.000	30	100.737.100	30	200.942.700	1	200.942.700	1	200.942.700	2	436.506.200	50	34,56	Bidang Pertanahan
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMANGUNAN	Persentase Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah Yang Tertangani																		Bidang Pertanahan	
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah Yang Tertangani																		Bidang Pertanahan	

2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (Stunting)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
SPM PERUMAHAN RAKYAT								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Menjadi kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	100%	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Menjadi kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	100%	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

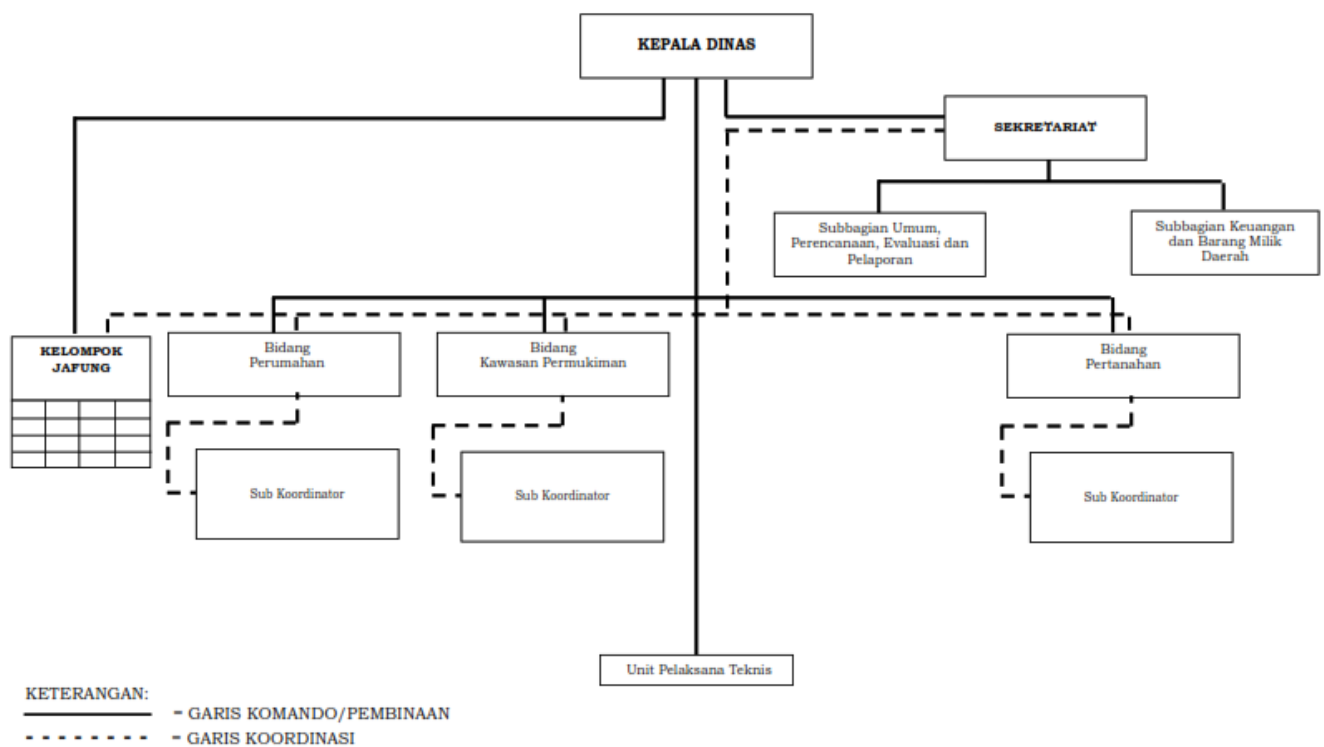
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa SPM Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman telah dapat mencapai target. Untuk tujuan dan target SDGs yang tidak terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target. Stunting menjadi salah satu proyek strategis nasional, seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Garut dalam menurunkan angka prevalensi stunting adalah dengan ditetapkannya Lokasi Fokus Intervensi Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Tahun 2023 melalui penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.355-DINKES/2022, serta diterbitkannya Program TOSS (Temukan, Obati, Sayangi balita Stunting) guna mengatasi stunting di Kabupaten Garut. Program TOSS ini merupakan program lanjutan setelah BPS (Bulan Penimbangan Stunting) yang telah berjalan selama bulan Juni tahun 2022 dalam rangka mengobati balita stunting serta mencegah timbulnya kasus stunting baru di Kabupaten Garut. Dengan Program Kawasan Permukiman melalui Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh (Nata Kota), Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melalui Kegiatan Rehabilitasi Rutilahu, serta Program Peningkatan PSU melalui Kegiatan Penyediaan PSU yang representatif, diharapkan

dapat menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Garut yang sekarang berada pada angka 15,6 % menjadi berada dibawah rata-rata nasional yaitu 14%. Pemkab Garut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 23,6 % pada tahun 2022, yang merupakan penurunan tertinggi kedua di Jawa Barat.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman

Sumber : Perbup Garut No. 235 Tahun 2021

Dengan Rincian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang diberikan kepada Kabupaten, dengan fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2) Sekretaris

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi Dinas meliputi pelayanan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah;
- pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan Dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan

pengelolaan administrasi Dinas; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a) Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat, dengan fungsi sebagai berikut:
- perencanaan kegiatan pengelolaan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - pelaksanaan kegiatan pengelolaan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah/aset berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat, dengan fungsi sebagai berikut:
- penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/aset Dinas;
 - pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/aset Dinas;
 - pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- 3) Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perumahan berdasarkan Rencana Strategis Dinas, dengan fungsi sebagai berikut:
- perencanaan pengelolaan urusan perumahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pelaksanaan pengelolaan urusan perumahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan perumahan

sesuai dengan lingkup tugasnya;

- pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Kawasan Permukiman

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kawasan permukiman berdasarkan Rencana Strategis Dinas, dengan fungsi sebagai berikut:

- perencanaan pengelolaan urusan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan pengelolaan urusan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Pertanahan

- perencanaan pengelolaan urusan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan pengelolaan urusan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut

Tujuan Renstra Perubahan	Sasaran Renstra Perubahan	Indikator Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IK K	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan permukiman	Meningkatnya Hunian Dengan Prasarana Sarana dan Utilitas yang memadai	Prosentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan Kepada Pemerintah Daerah			15 Perumahan	15 Perumahan	15 Perumahan	15 Perumahan	-	193%	15 Perumahan	15 Perumahan	
		Cakupan Penurunan Luasan Permukiman Kumuh			97,98 Ha	86,89 Ha	80,89 Ha	74,89 Ha	-	99,78 %	80,89 Ha	74,89 Ha	

		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni			33.800 Unit	31.530 Unit	29.260 Unit	26.990 Unit	160 %	96,87 %	29.260 Unit	26.990 Unit	
		Luas Kawasan Permukiman yang di lengkapi dengan PSU yang representatif			6.560,9 Ha	6.660,72 Ha	6.765,58 Ha	6.870,44 Ha	-	98,34 %	6.765,58 Ha	6.870,44 Ha	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Bidang Pertanahan	Prosentase penyelesaian kasus tanah negara			10%	10%	10%	10%	-	-	10%	10%	

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4.1. Isu Penting

Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Garut memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, meliputi perumahan, infrastruktur permukiman, dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang berdasarkan perundang – undangan. Dan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut selain memiliki urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman juga memiliki urusan Pertanahan.

Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun berjalan (2023) adalah :

- 1) Pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah belum dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi terhadap target capaian organisasi;
- 2) Belum tercapainya beberapa target tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Sedangkan Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi Tahun Renja 2023, sampai dengan triwulan II, antara lain :

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
- 2) Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sehingga mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah;
- 3) Tingginya komitmen organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk meningkatkan target kinerja.

Adapun upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Renja

pada tahun berikutnya diantaranya:

- 1) Perlu dilakukannya penyesuaian/reviu rencana anggaran dan target kinerja Renja SKPD yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;
- 2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
- 3) Verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD;
- 4) Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik;
- 5) Perlu segeranya dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengingat semakin kompleksnya data dan informasi yang perlu diolah.

2.4.2. Dampak terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Program Nasional

Dalam RPJMN 2020-2024, Pembangunan Infrastruktur menjadi salah satu dari 5 (lima) arahan utama Presiden, dalam hal ini hubungannya dengan penyediaan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau di perkotaan yang merupakan infrastruktur pelayanan dasar. Capaian nasional bergantung pada capaian daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dari Visi **“GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”**, terdapat beberapa dampak dari isu-isu penting yang berkaitan dengan capaian program nasional, antara lain:

1. Belum optimalnya pemenuhan akses perumahan dan permukiman yang layak;
2. Belum meratanya pembangunan antar wilayah;
3. Rendahnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan tingginya resiko bencana.

GERAKAN BESAR Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar

Prioritas Pembangunan Daerah 2024 untuk kewenangan urusan

perumahan dan permukiman adalah:

Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

- 1. Penangan permukiman kumuh perkotaan (menuju kumuh 0 Ha)** Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman melalui Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
- 2. Pencegahan permukiman kumuh perkotaan dan perdesaan (kumuh tak bertambah)** Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman melalui Peningkatan Kualitas Permukiman Rawan Kumuh
- 3. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni (3.000 Unit)
- 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas gedung yang layak teknis (perencanaan cermat konstruksi mantap)**
Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah
- 5. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman**
Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah
- 6. Pelayanan Pertanahan**

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2020 menyesuaikan dengan arah dan kebijakan nasional, pemerintah provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024. Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Menuntaskan persoalan kumuh dan pencegahan kumuh di perkotaan
2. Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni
3. Meningkatkan Kualitas PSU diLingkungan Permukiman dan Perumahan baik di perkotaan dan perdesaan

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana dan utilitas di perumahan

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan dan Permukiman disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Disperkim Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 2 bidang urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Disperkim Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 10 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Pengembangan Perumahan;
 - c. Program Kawasan Permukiman;
 - d. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
 - e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);

- f. Program Pengelolaan Izin Lokasi;
 - g. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - h. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
 - i. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee;
 - j. Program Penetapan Tanah Ulayat.
3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Disperkim Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 20 kegiatan, yang terdiri dari 42 sub kegiatan;
 4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 101.398.426.294,00 dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp.413.612.346.699,00 mengalami penyesuaian sebesar Rp.312.213.920.405 ,- pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp. 65.918.980.013 ,- , dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 menjadi sebesar Rp.101.398.426.294 ,- , yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut.
 5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Disperkim Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.10

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut

Kode	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	+				100.775.079.074	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				412.912.346.699				
1	+	1		PROGRAM	Tarogong	Persentase Unit	100%	11.248.921.214	PROGRAM	Tarogong	Persentase Unit	100%	11.073.677.099	
1	+	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tarogong Kidul	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	100%	55.040.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tarogong Kidul	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	100%	60.000.000	
1	+	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarogong Kidul	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	100%	6.894.702.140	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarogong Kidul	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	100%	7.491.677.099	
1	+	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tarogong Kidul	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	100%	149.448.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tarogong Kidul	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	100%	150.000.000	
1	+	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tarogong Kidul	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	100%	75.442.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tarogong Kidul	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	100%	400.000.000	
1	+	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarogong Kidul	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	100%	565.562.039	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarogong Kidul	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	100%	322.000.000	

1	4	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tarogong Kidul	Presentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	100%	1.751.106.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tarogong Kidul	Presentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	100%	1.815.000.000
1	4	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarogong Kidul	Presentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	100%	261.729.035	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarogong Kidul	Presentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	100%	310.000.000
1	4	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarogong Kidul	Presentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	100%	1.495.890.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarogong Kidul	Presentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	100%	525.000.000
1	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersebar di beberapa Kecamatan	Presentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan	100%	2.742.250.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersebar di beberapa Kecamatan	Presentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan	100%	17.106.599.300
1	4	2	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Presentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan Terdampak Program Pemerintah	100%	0		Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Presentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan Terdampak Program Pemerintah	100%	175.000.000
1	4	2	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Presentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah	100%	2.742.250.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Presentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah	100%	16.931.599.300
1	4	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kecamatan Garut Kota dan Kecamatan Lainnya	Persentase Perizinan dan Pengembangan Perumahan yang memenuhi	100%	1.479.710.400	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kecamatan Garut Kota dan Kecamatan Lainnya	Persentase Perizinan dan Pengembangan Perumahan yang memenuhi	100%	11.675.000.000
1	4	3	2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Persentase Perizinan dan Pengembangan Perumahan yang memenuhi persyaratan	100%	79.710.400	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Persentase Perizinan dan Pengembangan Perumahan yang memenuhi persyaratan	100%	450.000.000

1	4	3	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kecamatan Garut Kota	Presentase Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luasan dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertangani	100%	1.400.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kecamatan Garut Kota	Presentase Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luasan dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertangani	100%	11.225.000.000	
1	4	4		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tersebar di beberapa Kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	3.000 Unit	13.218.240.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tersebar di beberapa Kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	3.000 Unit	45.000.000.000	
1	4	4	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	3.000 Unit	13.218.240.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	3.000 Unit	45.000.000.000	
1	4	5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Tersebar di beberapa Kecamatan	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	21,86 Ha	72.085.958.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Tersebar di beberapa Kecamatan	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	21,86 Ha	328.057.070.300	
1	4	5	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Luasa Kawasan Permukiman Kumuh dengan PSU yang representatif	21 Ha	72.085.958.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Luasa Kawasan Permukiman Kumuh dengan PSU yang representatif	21 Ha	328.057.070.300	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN						
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN				623.346.620	URUSAN PEMERINTAHAN				700.000.000	
2	10	2		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Tersebar di beberapa Kecamatan	Jumlah Data Luas Tanah yang Sesuai Dengan Peruntukan Izin	1 Dokumen	56.157.120	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Tersebar di beberapa Kecamatan	Jumlah Data Luas Tanah yang Sesuai Dengan Peruntukan Izin	1 Dokumen	50.000.000	
2	10	2	2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Data Luas Tanah yang Sesuai Dengan Peruntukan Izin Lokasi yang diterbitkan	1 Dokumen	56.157.120	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Data Luas Tanah yang Sesuai Dengan Peruntukan Izin Lokasi yang diterbitkan	1 Dokumen	50.000.000	

2	10	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Tersebar di beberapa Kecamatan	Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang ditangani	5 Kasus	267.963.500	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Tersebar di beberapa Kecamatan	Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang ditangani	5 Kasus	250.000.000	
2	10	4	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang ditangani	5 Kasus	267.963.500	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang ditangani	5 Kasus	250.000.000	
2	10	5		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Presentase Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah Yang Tertangani	100%	0		Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Presentase Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah Yang Tertangani	100%	50.000.000	
2	10	5	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Presentase Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah Yang Tertangani	100%	0		Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Presentase Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah Yang Tertangani	100%	50.000.000	
2	10	6		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah yang Ditetapkan	1 Dokumen	299.226.000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah yang Ditetapkan	1 Dokumen	250.000.000	
2	10	6	2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah yang Ditetapkan	1 Dokumen	299.226.000	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah yang Ditetapkan	1 Dokumen	200.000.000	

2	10	6	2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Ganti Kerugian Tanah Kerugian Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	1 Dokumen	0		Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Ganti Kerugian Tanah Kerugian Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	1 Dokumen	50.000.000	
2	10	7		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang dalam daerah Kabupaten/	1 Data	0		Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang dalam daerah Kabupaten/	1 Data	100.000.000	
2	10	7	2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang dalam daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan	1 Lokasi	0		Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab. Garut	Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang dalam daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan	1 Lokasi	100.000.000	

Tabel 2.11 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	04								412,912,346,699	65,469,580,013	100,775,079,674				487,358,677,099					
1	04	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	%	100 %	100 %									
							Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	100	n/a	100	100	11,073,677,099	11,395,223,013	11,248,921,214			100 % 100	11,088,677,099		
1	04	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	%	%	100 %	100 %	60,000,000	55,040,000	55,040,000			100 %	60,000,000		
1	04	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			60 Eksemplar	60 Eksemplar/Buku	30,000,000	24,995,000	24,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	60 Eksemplar/Buku	30,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian dan kinerja yang tersusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 dokumen 1 Laporan	1 dokumen 1 Laporan	30,000,000	30,045,000	30,045,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 dokumen 1 Laporan	30,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	%	%	100 %	100 %	7,491,677,099	7,660,871,104	6,894,702,140			100 %	7,791,677,099		
1	04	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	7,461,677,099	7,635,671,104	6,669,702,140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	66 Orang/bulan	7,761,677,099	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan (dokumen) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	30,000,000	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	1 Dokumen 1 Laporan	30,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	%	%	%	100 %	100 %	150,000,000	149,448,000	149,448,000					100 %	150,000,000		
1.04.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	149,448,000	149,448,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	%	%	%	100 %	100 %	400,000,000	73,442,600	73,442,600					100 %	150,000,000		
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				110 Stel	110 Stel	100,000,000	73,442,600	73,442,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	110 Stel	100,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Diklat/Bimtek Peningkatan Kompetensi Aparatur				3 Orang	3 Orang	300,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	3 Orang	50,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	%	%	%	100 %	100 %	322,000,000	439,317,439	565,562,039					100 %	447,000,000		
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27,000,000	26,169,600	26,169,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	1 Paket	27,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100,000,000	95,339,239	172,446,939		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	3 Paket	100,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	60,000,000	64,406,600	133,545,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	7 Paket	60,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				111 Dokumen	111 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	111 Dokumen	10,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.06 06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	52,600,000	52,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	12 Laporan	50,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	75,000,000	170,800,000	170,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	70 Laporan	200,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi	%	%	100 %	100 %		1,815,000,000	1,806,279,100	1,751,106,800					100 %	2,025,000,000		
1 04 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	1,290,000,000	1,366,646,600	1,331,546,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	4 Unit	1,300,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	425,000,000	266,650,000	254,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	7 Unit	425,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	100,000,000	130,980,500	165,446,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	12 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	%	%	100 %	100 %		310,000,000	311,326,170	261,729,033					100 %	320,000,000		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.04.01.2.05.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	106,599,420	57,002,285		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	12 Laporan	100,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.01.2.05.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	10,000,000	17,500,000	17,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	10 Laporan	20,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.01.2.05.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	187,226,750	187,226,750		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	1 Laporan	200,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Presentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	%	%		100 %	100 %	325,000,000	897,498,600	1,493,890,600					100 %	143,000,000		
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara				7 Unit/Tahun	7 Unit/Tahun	75,000,000	92,740,000	92,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	7 Unit/Tahun	45,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Rusun yang terpelihara Luas Gedung/Kantor yang terpelihara				1 Unit 2 Gedung/Tahun 7500 m2/Tahun	1 Unit 2 Gedung/Tahun 7500 m2/Tahun	450,000,000	804,758,600	1,403,150,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	1 Unit 2 Gedung/Tahun 7500 m2/Tahun	100,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Korban Permukiman Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 %	n/a %	0 %	0 %	17,106,599,300	950,000,000	2,742,250,000			0 %	11,470,000,000					
		Prosentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah	100 %	n/a %	100 %	100 %												
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi	Presentase Penanganan Rumah																

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 04 02 2.03 02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen site plan. DED bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen	200,000,000		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	1 dokumen 1 Dokumen	250,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 02 2.03 03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota				0.25 ha 0.25 Ha	0.25 ha 0.25 Ha	950,000,000		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	0.25 ha 0.25 Ha	1,000,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 02 2.03 03	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun jumlah rumah yang tertangani				73 Unit Rumah 73 unit	73 Unit Rumah 73 unit	14,281,599,300		0	250,200,000	Bantuan Keuangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	73 Unit Rumah 73 unit	8,000,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Perizinan dan Pengembangan Perumahan yang memenuhi persyaratan	%	%		100 %	100 %	11,675,000,000	1,500,000,000	1,479,710,400				100 %	13,300,000,000			
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Perizinan dan Pengembangan Perumahan yang memenuhi persyaratan	%	%		100 %	100 %	450,000,000	100,000,000	79,710,400				100 %	500,000,000			
1 04 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	450,000,000	100,000,000	79,710,400	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	1 Laporan	500,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luasan dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertangani	%		%	100 %	100 %	11,223,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000				100 %	12,800,000,000			
1 04 03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen site plan dan DED Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh				1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen	600,000,000	349,999,900	349,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	1 dokumen 1 Dokumen	700,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH				100 Unit Rumah 100 unit	100 Unit Rumah 100 unit	1,125,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	100 Unit Rumah 100 unit	1,500,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen pengendalian penyelenggaraan perumahan/perumahan permukiman kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh				1 dokumen 1 Laporan	1 dokumen 1 Laporan	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	1 dokumen 1 Laporan	600,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah luasan (ha) penangan infrastruktur kawasan kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakany/Dipugar				1 ha 1 Ha	6 ha 6 Ha	9,000,000,000	1,050,000,100	1,050,000,100		Bantuan Keuangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	6 ha 6 Ha	10,000,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit		Unit	3000 Unit	3000 Unit	43,000,000,000	3,305,000,000	13,218,240,000					3000 Unit	30,000,000,000		
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit		Unit	3000 Unit	3000 Unit	43,000,000,000	3,305,000,000	13,218,240,000					3000 Unit	30,000,000,000		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				195 Unit Rumah	195 Unit Rumah	45,000,000,000	3,505,000,000	13,218,240,000		Bantuan Keuangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	195 Unit Rumah	50,000,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	Ha		Ha	21,86 Ha	21,86 Ha	328,057,070,300	48,119,357,000	72,085,958,060						21,86 Ha	401,700,000,000	
1.04.05.2.01	Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	Luasa Kawasan Permukiman Kumuh dengan PSU yang representatif	Ha		Ha	21 Ha	21 Ha	328,057,070,300	48,119,357,000	72,085,958,000						21 Ha	401,700,000,000	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				4 Dokumen	4 Dokumen	600,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	4 Dokumen	700,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				100 Lokasi	100 Lokasi	326,957,070,300	47,909,557,000	71,881,161,400		Bantuan Keuangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	100 Lokasi	400,000,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				12 Laporan	12 Laporan	500,000,000	209,800,000	204,796,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	12 Laporan	600,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1 04 03 2.01 04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				5 Laporan	5 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	3 Laporan	400,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																			
								700,000,000	449,400,000	623,346,620							1,050,000,000		
2 10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Jumlah Data Luas Tanah yang Sesuai Dengan Peruntukan Izin Lokasi yang diterbitkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	64,200,000	56,157,120							1 Dokumen	150,000,000	
2 10 02 2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Luas Tanah yang Sesuai Dengan Peruntukan Izin Lokasi yang diterbitkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	64,200,000	56,157,120							1 Dokumen	150,000,000	
2 10 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah dokumen hasil Monitoring terkait izin lokasi untuk investasi dan kegiatan usaha oleh masyarakat swasta				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	64,200,000	56,157,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang ditangani	Kasus		Kasus	5 Kasus	5 Kasus	250,000,000	285,200,000	267,963,500							3 Kasus	200,000,000	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang ditangani	Kasus		Kasus	5 Kasus	5 Kasus	250,000,000	285,200,000	267,963,500							3 Kasus	200,000,000	
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani				30 Berita Acara 30 kasus	30 Berita Acara 30 kasus	250,000,000	285,200,000	267,963,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	30 Berita Acara 30 kasus	200,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
2 10 03	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah Yang Tertangani	%		%	100 %	100 %	50,000,000	0	0							100 %	100,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah Yang Tertangani	%		%	100 %	100 %	30,000,000	0	0				100 %	100,000,000			
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen 5 kasus	5 Dokumen 5 kasus	50,000,000	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	5 Dokumen 5 kasus	100,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah yang Ditetapkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	230,000,000	100,000,000	299,226,000				1 Dokumen	430,000,000			
2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah yang Ditetapkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	100,000,000	299,226,000				1 Dokumen	330,000,000			
2 10 06 2.01 01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen 1 dokumen	1 Dokumen 1 dokumen	200,000,000	100,000,000	299,226,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	1 Dokumen 1 dokumen	330,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 10 06 2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ganti Kerugian Tanah Kerugian Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0				1 Dokumen	100,000,000			
2 10 06 2.02 02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang dalam daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Data 1 Data		Data n/a Data	1 Data 1 Data	1 Data 1 Data	100,000,000	0	0				1 Data 1 Data	150,000,000			
2 10 07 2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang dalam daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan	Lokasi		Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100,000,000	0	0				1 Lokasi	150,000,000			
2 10 07 2.01 03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah database tanah ulayat di Kabupaten Garut Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota				1 data 1 Dokumen	1 data 1 Dokumen	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	0	1 data 1 Dokumen	150,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
TOTAL								413,612,346,699	65,918,980,013	101,398,426,294					488,608,677,099			

Sumber : Rancangan RKPd Perubahan 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan,

pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan pembangunan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi ketiga yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang, dengan tujuan yang terkait Dinas Perumahan dan Permukiman adalah meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan permukiman dan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik,

serta sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Meningkatnya Hunian dengan Prasarana Sarana dan Utilitas yang memadai serta Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Bidang Pertanahan.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat yaitu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 153 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan permukiman, dengan indikator:
 - a. Luas Kawasan permukiman layak huni
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik, dengan indikator:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut

memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Dinas perumahan dan permukiman Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman, dengan indikator:
 - a. Menurunnya Luas Kawasan Kumuh dengan indikator Cakupan Penurunan luasan permukiman kumuh (7+1).
 - b. Menurunnya Luas Kawasan Rawan Kumuh dengan indikator Cakupan Penurunan Luasan permukiman rawan kumuh.
 - c. Meningkatnya Luas Kawasan Permukiman Perdesaan Yang Tertata dengan indikator Luasan Kawasan permukiman Perdesaan Yang Tertata.
 - d. Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dengan indikator Jumlah rumah tidak layak huni.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Dinas Perumahan dan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan permukiman	Luas Kawasan Permukiman Layak Huni	Meningkatnya Hunian Dengan Prasarana Sarana dan Utilitas yang memadai	Prosentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah	100%

				Jumah PSU Perumahan yang diserahterimakan Kepada Pemerintah Daerah	15 Perumahan
				Cakupan Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	80,89 Ha
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	29.260 Unit
				Luas Kawasan Permukiman yang dilengkapi dengan PSU yang representatif	6.765,58 Ha
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Bidang Pertanahan	Prosentase penyelesaian kasus tanah negara	10%

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023

dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	10	20	42	101.398.426.294

Sumber : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 2 bidang urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.
2. Jumlah program sebanyak 10 program, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Pengembangan Perumahan;
 - c. Program Kawasan Permukiman;
 - d. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
 - e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
 - f. Program Pengelolaan Izin Lokasi;
 - g. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - h. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
 - i. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee;
 - j. Program Penetapan Tanah Ulayat.
3. Jumlah kegiatan sebanyak 20 kegiatan;
 4. Jumlah sub kegiatan sebanyak 42 subkegiatan;
 5. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 101.398.426.294,-, dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp.413.612.346.699,- mengalami penyesuaian sebesar Rp.312.213.920.405,- pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp. 65.918.980.013,-, dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 menjadi sebesar Rp.101.398.426.294,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut: (Silakan Sesuaikan)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Tolok Ukur		Target	Pagu Indikatif		
					Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1.4.1.2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan															110 Stel	100.000.000
1.4.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Peserta Diklat/Bimtek Peningkatan Kompetensi Aparatur															5 Orang	50.000.000
1.4.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Presentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi							100%	100%						100%	447.000.000
1.4.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan															1 Paket	27.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif	
					Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.4.1.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														5 Paket	100.000.000
1.4.1.2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan														7 Paket	60.000.000
1.4.1.2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan														111 Dokum	10,000,000
1.4.1.2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu														12 Laporan	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif	
					Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.4.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													70 Laporan	200.000.000	
1.4.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Presentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi						100%	100%					100%	2.025.000.000	
1.4.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan													4 Unit	1.500.000.000	
1.4.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan													7 Unit	425.000.000	
1.4.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													12 Unit	100.000.000	
1.4.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Presentasi Unit Kerja yang mendapatkan						100%	100%					100%	320.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif		
					Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
				pelayanan administrasi															
1	4	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan											12 Laporan	100.000.000
1	4	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan											10 Laporan	20.000.000
1	4	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan											1 Laporan	200.000.000
1	4	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi											100%	145.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif	
					Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.4.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Presentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan Terdampak Program Pemerintah							100%	100%	175.000.000	-			100%	220.000.000
1.4.2.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									175.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	220.000.000
1.4.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Presentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah							100%	100%	16.931.599.300	2.742.250.000			100%	11.250.000.000
1.4.2.03	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi									1.500.000.000	2.492.050.000	Bantuan Keuangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Unit Rumah	2.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif				
					Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	4	3	2,0 3															100%		12.800.000.000	
1	4	3	2,0 3	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pem ugaran Permukiman Kumuh		Jumlah dokumen site plan dan DED Peremajaan/Pemu garan Permukiman Kumuh Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemu garan Permukiman Kumuh													1 dokumen 1 Dokumen	700.000.000
1	4	3	2,0 3	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH													100 Unit Rumah 100 unit	1.500.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024											
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif								
					Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
1	4	3	2,0 3	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh												1 dokumen 1 Laporan	600.000.000						
1	4	3	2,0 3	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar												1 ha 1 Ha	6 ha 6 Ha	9.000.000.000	1.050.000.100	Bantuan Keuangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 ha 6 Ha	10.000.000.000
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki												3000 Unit	3000 Unit	45.000.000.000	13.218.240.000			3000 Unit	50.000.000.000
1	4	4	2,0 1		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki												3000 Unit	3000 Unit	45.000.000.000	13.218.240.000			3000 Unit	50.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif	
					Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.4.4.2.01.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Jumlah rumah tidak layak huni Yang di perbaiki														195 Unit Rumah 195 unit	50.000.000.000
1.4.5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif															21,86 Ha	401.700.000.000
1.4.5.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan PSU yang representatif						21 Ha	21 Ha						21 Ha	401.700.000.000
1.4.5.2.01.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah dokumen perencanaan PSU perumahan urusan penyelenggaraan														4 Dokumen 4 dokumen	700.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif		
					Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
		yang diterbitkan																	
2	1 0	2	2,0 1		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah Data Luas Tanah yang sesuai Dengan Peruntukan Izin Lokasi yang diterbitkan										1 Dokumen	150.000.000	
2	1 0	2	2,0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha		Jumlah dokumen hasil Monitoring terkait izin lokasi untuk investasi dan kegiatan usaha oleh masyarakat swasta			1 Dokumen	1 Dokumen			50.000.000	56.157.120	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	150.000.000
2	1 0	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang ditangani				5 Kasus	5 Kasus			250.000.000	267.963.500			5 Kasus	200.000.000
2	1 0	4	2,0 1		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang ditangani					5 Kasus	5 Kasus	250.000.000	267.963.500			5 Kasus	200.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif		
					Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2	1042012		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															30 Berita Acara 30 kasus	200.000.000
2	105		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah Yang Tertangani														100%	100.000.000
2	105	2,01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah Yang Tertangani					100%	100%							100%	100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif	
					Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	106	2,02															1 Dokumen	100.000.000
2	106	2,02	2														1 Dokumen 1 dokumen	100.000.000
2	107																1 Data 1 Data	150.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif	
					Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		Masyarakat																
2	1072,01			Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang dalam daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan						1 Lokasi	1 Lokasi	100.000.000	-			1 Lokasi	150.000.000	
2	1072,013		Jumlah database tanah ulayat di Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota								100.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 data 1 Dokumen	150.000.000	
TOTAL												413.612.346.699	101.398.426.294				488.608.677.099	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan perubahan pertama untuk RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024. Perubahan Rencana kerja ini merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2023 sebagai upaya pencapaian prioritas pembangunan dalam Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat yaitu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah.

Berapa catatan penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perencanaan rencana kerja perangkat daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana kerja ini merupakan upaya pencapaian prioritas pembangunan dalam Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat yaitu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni serta Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah.
2. Pelaksanaan program kegiatan ini juga diprioritaskan kepada kegiatan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut;
3. Apabila dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran ternyata anggaran pemerintah daerah tidak mencukupi untuk pelaksanaan renja perangkat daerah, maka program kegiatan yang diprioritaskan adalah yang bersifat wajib mengikat, mendukung langsung RPJMD dan janji politik pimpinan daerah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan yang bersifat mendesak atau tanggap darurat kebencanaan;

4. Dalam rangka anggaran tidak cukup tersedia, maka yang program kegiatan yang bersifat tidak mendukung secara langsung hal-hal tersebut di atas atau dapat ditunda pelaksanaannya maka dapat ditunda pendanaannya pada tahun 2024 sampai tersedia dana yang mencukupi.

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2023 dengan efektif dan efisien;
2. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 adalah langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2023, dimana Renja Perubahan Tahun 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Perumahan dan Permukiman wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2023, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Pada Renja perubahan ini terdapat penyesuaian APBD murni Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman; dan
6. Renja Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Setiap bidang dalam Dinas Perumahan dan Permukiman meliputi Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan, Sekretariat dan UPT Wilayah dan Rusun wajib memfokuskan program dan kegiatan pada Renja 2023 dan menyelaraskan dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra 2019-2024 sehingga target Indikator Kinerja Daerah tercapai. Program dan kegiatan yang terdapat pada Renja 2023 ini bersumber dana dari APBD kabupaten, akan tetapi pencapaian indikator kinerja daerah merupakan hasil pembangunan dengan sumber dana dari APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, Swasta dan Masyarakat.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

Untuk itu, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun 2023 lebih fokus terhadap target-target pada program dan kegiatan yang yang dapat mencapai target-target tersebut. Keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut merupakan tanggung jawab bersama, secara struktural satu sama lain saling terkait sehingga dalam pelaksanaannya harus terpadu dan terjalin koordinasi yang baik.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN